



# Kerja Menjawab Tantangan

Foto: Douwes Dekker, *Tanah Air Kita*, Land - en volk van Indonesie, 1950

**P**ada tahun 1918, saat para suster CB sampai di tanah misi, pemerintah Hindia Belanda sedang merencanakan perluasan pendidikan bagi bumiputera. Dalam surat bertanggal 2 Maret 1918 nomor 13/133 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda

(Van Limburg Stirum), Pleijte sebagai Menteri Jajahan menulis keinginan pemerintah untuk meluaskan kesempatan pendidikan bagi bumiputera:

“Menteri mengharap dipertimbangkan apakah dengan jejak yang sekarang penyebaran umum dari pendidikan ini [Pendidikan

---

Rendah Bumiputera] mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Jumlah sekolah rendah Bumiputera (negeri, swasta, dan desa) sekarang kurang lebih 10.000. Bagi jumlah penduduk 50.000.000 jiwa menurut penetapan sekarang akan diperlukan 40.000 sekolah untuk dapat menampung semua anak yang berusia sekolah. Dalam tahun 1911-1915 tambahnya jumlah sekolah rata-rata 780 per tahun. Dengan kecepatan yang sama keterlambatan ini akan baru dapat terkejar dalam 38 tahun, sedangkan dalam jangka waktu itu penduduk sudah berlipat dua kali, sehingga akan hanya 50% dari anak-anak akan mendapat kesempatan sekolah.

Apakah perluasan pendidikan ini tidak dapat lebih dipercepat? Secara keseluruhan untuk Hindia Belanda jangka waktu 35 tahun ini mungkin dianggap tidak terlalu lama, tetapi buat Jawa, Madura, Sumatera Barat, dan Tondano, jangka waktu ini harus lebih singkat.” (van Der Wall, 1977: 52)

Setidaknya, ada dua hambatan besar perluasan kesempatan pendidikan bagi bumiputera: ketersediaan dana dan guru. Meskipun pemerintah bisa menyediakan uang, termasuk dengan kebijakan desentralisasi ke pemerintah daerah, namun jika guru tidak tersedia tentu saja perluasan itu tidak bisa dilaksanakan.

Masalah ketersediaan guru semakin pelik mengingat guru tentu saja harus dan seharusnya sudah berpendidikan yang memadai agar bisa mengajar.

Dalam laporan pos tahun 1917, kita mendapatkan informasi bahwa jumlah guru yang dihasilkan oleh lembaga yang telah ada dan yang akan didirikan pemerintah Hindia Belanda dalam tahun itu sudah pasti tidak cukup untuk memenuhi permintaan guru dalam tujuh tahun mendatang. Akan ada kekurangan 650 tenaga pengajar (van Der Wall, 1977: 49). Pemerintah Hindia Belanda jelas tidak bisa menyediakan guru sebanyak itu, baik dari guru-guru yang didatangkan dari Belanda, dari lulusan sekolah guru negeri, atau dari swasta. Inilah salah satu alasan surat permohonan pembukaan sekolah guru oleh Romo Frans van Lith pada 1904 segera dikabulkan oleh pemerintah. Kesempatan serupa, pada masa awal Indonesia merdeka, hendak dicoba oleh para suster CB.

Dalam perkembangannya, Hindia Belanda memang selalu kekurangan guru, bahkan sampai berpuluh tahun setelah Indonesia merdeka. Situasi inilah yang kemudian ditanggapi dengan semakin serius oleh para suster CB. Semula, sebagian suster diperbantukan mengajar di beberapa sekolah, namun akhirnya mereka membuat keputusan besar: harus mengelola sekolah sendiri, terutama sejak Indonesia merdeka. ◆